

LAPORAN EVALUASI NILAI SMART KANTOR WILAYAH DAN UPT TAHUN 2021



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN

Data Dukung Target Kinerja B01
Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan
Tahun 2022



**REFORMASI
HUKUM**





LAPORAN TENTANG EVALUASI NILAI SMART KANTOR WILAYAH DAN UPT TAHUN 2021

A. Pendahuluan

1. Umum

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas suatu objek. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal, Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 telah menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud adalah Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. IKU tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan organisasi. Pada saat ini IKU tersebut kita kenal dengan nama IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA).

IKPA dan SMART merupakan dua *tools* yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan secara nasional kepada seluruh kementerian/lembaga. Dengan kombinasi nilai IKPA dan SMART sebagai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyajikan informasi tentang Laporan Evaluasi Nilai SMART Tahun 2021 pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Tujuan

Memastikan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran telah efektif dan efisien serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sehingga satuan kerja dapat mengoptimalkan capaian kinerja anggaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi data capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

4. Dasar

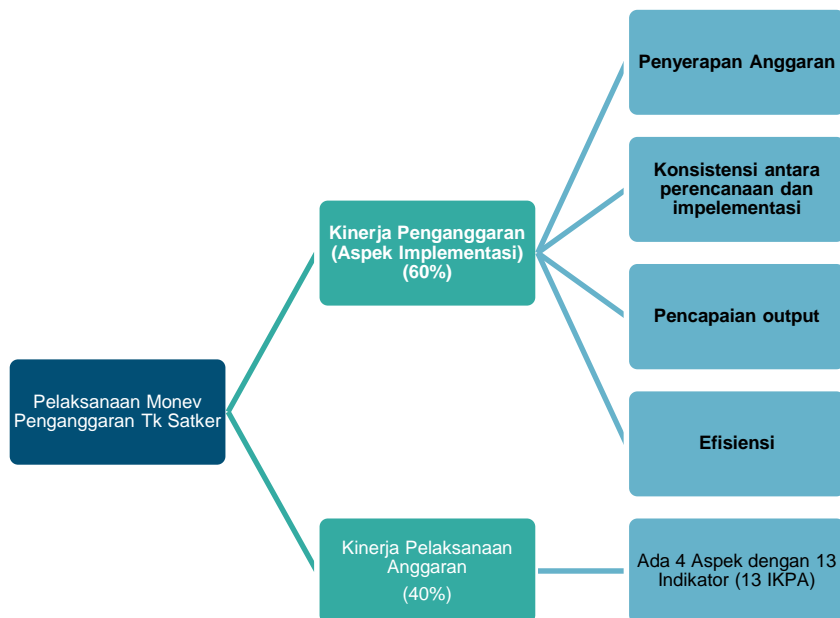
- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Sepanjang tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART serta pendampingan kepada satuan kerja agar memahami indikator-indikator pada SMART dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai optimal. Selanjutnya proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART tahun 2021 pada seluruh

satuan kerja melalui tahapan menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi data capaian kinerja anggaran 42 (empat puluh dua) satuan kerja yang diperoleh dari aplikasi SMART.

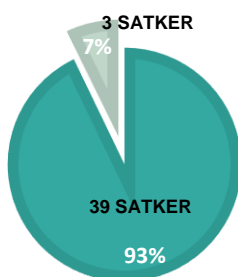
C. Hasil yang Dicapai



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran tingkat satuan kerja meliputi 2 pengukuran yaitu Kinerja Penganggaran (Aspek Implementasi) yang diperoleh dari nilai SMART dan kinerja pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari nilai IKPA. Nilai kinerja anggaran ini ditetapkan sebesar 95%. Para penanggung jawab/ operator telah melakukan pengisian Aplikasi SMART sesuai dengan output yang tercapai dan menjadi tolak ukur capaian kinerja. Berbagai upaya telah dilakukan agar satuan kerja mampu meraih target yang ditentukan namun masih ada beberapa satker yang tidak mencapai nilai optimal. Berikut hasil capaian nilai SMART seluruh satuan kerja:

NILAI KINERJA SMART 2021

■ > 90% (SANGAT BAIK) ■ > 80% - 90% (BAIK)



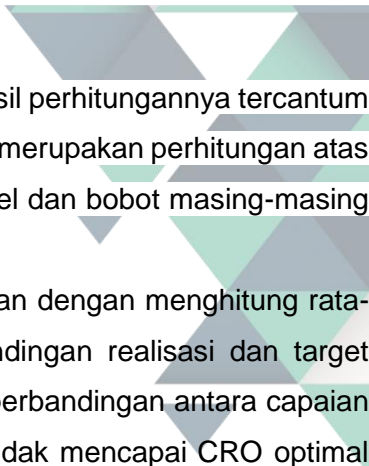
No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SETJEN)	99.83	98.49	99.87	100	20	100
2	408772	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (AHU)	99.4	94.67	99.56	100	20	100
3		BHP MAKASSAR	98.36	90.87	95.84	100	20	100
4	408774	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (PAS)	96.43	98.7	99.89	100	15.22	88.04
5	109144	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	99.77	99.64	98.92	100	20	100
6	407072	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	99.84	99.88	99.19	100	20	100
7	407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	86.19	99.16	99.88	100	0.84	52.09
8	407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	99.93	99.39	99.94	100	20	100
9	407101	LPKA KELAS II MAROS	99.46	99.57	97.27	100	20	100
10	407117	LAPAS TAKALAR	99.97	99.74	99.98	100	20	100
11	407123	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	96.91	97.4	94.95	100	17.31	93.29
12	407132	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	98.18	97.26	99.76	100	17.88	94.71
13	407148	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTA ENG	98.03	98.25	90.12	100	20	100
14	407154	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	99.87	98.91	99.89	100	20	100
15	407163	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	96.2	98.84	99.83	100	14.89	87.22
16	407179	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	96.95	97.24	99.27	100	16.3	90.74
17	407185	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	93.59	99.88	99.35	100	11.21	78.03
18	407191	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	99.74	98.48	99.39	100	20	100
19	407205	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	96.19	99.44	99.49	100	14.87	87.18
20	407211	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	98.1	99.67	89.74	100	20	100
21	407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	98.6	99.9	92.37	100	20	100
22	407236	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	87.45	96.87	99.01	100	3.13	57.81
23	407242	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	98.26	98.63	99.89	100	17.77	94.44
24	407251	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	98.58	99.81	99.83	100	18.09	95.22
25	407302	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	99.3	99.23	99.92	100	19.15	97.88
26	407318	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGGANG	99.77	98.1	99.73	100	20	100

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
27	407324	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	99.96	99.61	99.97	100	20	100
28	497821	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	98.52	99.54	99.93	100	18	95.01
29	526793	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	98.79	99.41	99.94	100	18.4	96.01
30	626122	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG	99.81	98.39	99.83	100	20	100
31	653044	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	99.91	99.23	99.93	100	20	100
32	653154	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	85.7	99.3	97.63	100	0.7	51.76
33	408775	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (IMIGRASI)	98.93	90.47	99.21	100	20	100
34	408216	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	93.4	86.97	98.03	100	13.03	82.59
35	409001	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	91.55	85.05	98.39	97.19	12.33	80.83
36	418937	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	98.03	85.01	97.19	100	20	100
37	664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	99.43	97.38	99.76	100	19.61	99.04
38	408776	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (KI)	93.47	97.86	98.54	100	11.52	78.81
39	408777	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (PP)	99.22	98.57	99.88	100	19.13	97.82
40	408778	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (HAM)	99.14	98.33	98.99	100	19.28	98.21
41	408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BPHN)	99.82	98.41	99.87	100	20	100
42	408780	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BALITBANGHAM)	99.66	98.37	99	100	20	100

Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Tabel.1 Hasil Capaian Nilai SMART Satuan Kerja Tahun 2021





Nilai kinerja anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada *dashboard* masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

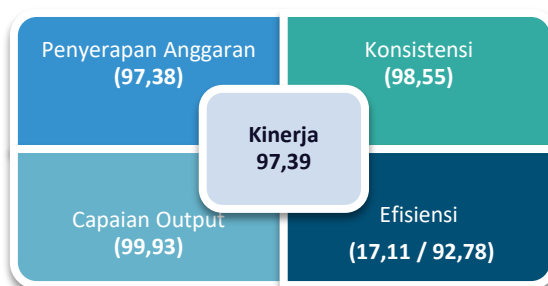
1. Capaian keluaran (output) kegiatan (bobot 43,5%) dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara capaian dan target indikator, dari 42 satker hanya 1 satker yang tidak mencapai CRO optimal yaitu Kanim Kelas II TPI Parepare dengan nilai capaian RO sebesar 97,19%. Hal ini disebabkan karena realisasi volume output (RVRO) tidak mencapai target volume output (TVRO);
2. Efisiensi (bobot 28,6%) dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Terdapat 10 (sepuluh) satuan kerja yang memperoleh nilai efisiensi dibawah 90%, bahkan Bapas Kelas II Palopo, Lapas Kelas I Makassar, dan Rutan Kelas IIB Rappang memperoleh nilai efisinesi dibawah 60% . Meningkatkan nilai efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK (melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa anggaran berarti harus mengondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi;
3. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan (bobot 18,29%) dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Pada variabel ini hampir seluruh satuan kerja termasuk dalam kategori Sangat Baik kecuali Lapas Kelas IIA Parepare yang masuk dalam kategori Baik;
4. Penyerapan anggaran (bobot 9,7%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Kanim Kelas I TPI Makassar, Kanim Kelas II TPI Parepare dan Kanim Kelas II Non TPI Palopo masuk kedalam urutan tiga satker dengan penyerapan anggaran terendah namun masih termasuk dalam kategori Baik. Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini disebabkan oleh penurunan batas maksimum pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP hingga 60%.

Berikut rekapitulasi nilai rata-rata SMART pada 42 (empat puluh dua) Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan per Unit Eselon I:

UNIT ESELON I	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
SETJEN	99.83	98.49	98.87	100	20	100
BPHN	99.82	98.41	99.87	100	20	100
BALITBANGHAM	99.66	98.37	99	100	20	100
DITJEN PP	99.22	98.57	99.88	100	19.13	97.82
DITJEN HAM	99.14	98.33	98.99	100	19.28	98.21
DITJEN AHU	98.88	92.77	97.7	100	20	100
DITJEN PAS	97.24	98.95	98.44	100	16.68	91.7
DITJEN IMIGRASI	96,27	88,98	98.52	99.44	16.99	92.5
DITJEN KI	93.47	97.86	98.54	100	11.52	78.81

Tabel.2 Hasil Capaian Nilai SMART Tahun 2021 Per Unit Eselon I

D. Simpulan dan Saran



Perolehan nilai rata-rata kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah **97,39%** dengan kategori **Sangat Baik**. Namun, dengan pencapaian tersebut masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan anggaran pada tahun 2021, salah satunya adalah beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kerja dan Rencana Penarikan Dana yang telah disusun dikarenakan masih dalam masa pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM Darurat (Level 4) pada beberapa kabupaten/kota. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan *refocusing* anggaran terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 cukup membantu satuan kerja dalam memahami pengisian capaian pada aplikasi SMART dan strategi yang dapat dilakukan agar bisa mencapai nilai optimal. Untuk itu monitoring dan evaluasi secara

berkelanjutan diseluruh satuan kerja harus terus berlanjut untuk merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan nilai SMART tahun 2022 serta upaya perbaikan utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kedepannya bisa dipertimbangkan pemberian penghargaan satker berprestasi dengan capaian realisasi anggaran, SMART dan IKPA.

E. Penutup

Demikian laporan evaluasi nilai SMART tahun 2021 ini dibuat sebagai data dukung pemenuhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dibuat di Makassar
pada tanggal 21 Februari 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI,



SIRAJUDDIN
NIP. 196212311984121001

